



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10110

Nomor : B-473/Bua.3/VII/2022

19 Juli 2022

Sifat : Penting

Lampiran : Satu Bundel

Hal : Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK terkait Pengelolaan Kas dan Penertiban Rekening Satuan Kerja Tahun 2022

Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Eselon I
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding
3. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-40/MK.5/2022 tanggal 18 Juni 2022 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terkait Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: UND-201/PB.3/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh rekening satuan kerja mendapatkan persetujuan Kuasa BUN Pusat/Daerah dan tidak ada penggunaan rekening pribadi;
2. Proses Restrukturisasi rekening Bendahara dari giro menjadi virtual dalam rangka simplifikasi dan akuntabilitas pengelolaan rekening wajib dilaksanakan;
3. Mengoptimalkan penggunaan Cash Management System (CMS), kartu debit, kartu kredit dan Digipay;
4. Satuan kerja wajib melakukan penyamaan data antara data rekening yang aktif pada aplikasi Komdanas dengan data rekening pada aplikasi SPRINT Kementerian Keuangan RI;
5. Satuan kerja wajib segera melakukan updating data rekening pada aplikasi Komdanas pada menu keuangan/lk bulanan/daftar rekening dengan mengupdate data kode KPPN, kode BA KL, Kode Eselon, Kode Satker, Nama Satker, Nomor Rekening, nama Rekening, Nama Bank, Kode Jenis Rekening, Nomor Surat Izin Pembukaan Rekening, TNP/Belum, Saldo Rekening, VA/Giro;
6. Apabila terdapat rekening aktif yang belum terinput pada aplikasi Komdanas dan aplikasi SPRINT agar segera dilakukan penginputan agar tidak terjadi selisih pada waktu rekonsiliasi;
7. Rekening yang sudah tidak aktif dan masih terinput pada aplikasi Komdanas dan aplikasi SPRINT agar dilakukan penonaktifan dengan merubah status rekening dari aktif menjadi tidak aktif/ditutup;
8. Satuan Kerja secara rutin melakukan penginputan saldo rekening pada aplikasi Komdanas untuk kepentingan pemeriksaan internal maupun eksternal;

9. Apabila satuan kerja tidak menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas sampai dengan hari Jumát tanggal 22 Juli 2022 dan masih terdapat selisih pada data rekonsiliasi rekening dengan Kementerian Keuangan maka akan dilaksanakan penundaan pembayaran tunjangan kinerja pada satuan kerja;

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



DEDI WARYOMAN
NIP. 19630407 198403 1 002 

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-40/MK.5/2022 18 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terkait Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021

Yth. Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (LHP SPI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam LHP tersebut BPK RI menyampaikan bahwa terdapat temuan berupa Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas, dan Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Berkenaan dengan penyelesaian atas temuan BPK tersebut di atas, Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk:
 - a. meningkatkan pengendalian dan pemantauan atas ketertiban penyajian dan pengelolaan kas sesuai ketentuan;
 - b. meningkatkan ketertiban pengelolaan dan pengendalian terhadap rekening Pemerintah lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. memastikan seluruh rekening pemerintah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN Pusat/Daerah dan tidak ada penggunaan rekening pribadi; dan
 - d. menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan.
3. Dalam rangka mencegah temuan berulang, Kementerian Negara/Lembaga perlu melakukan optimalisasi pengawasan efektivitas pengelolaan kas dan rekening, baik melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung maupun melalui peran APIP Kementerian Negara/Lembaga.
4. Kementerian Negara/Lembaga diminta pula untuk melaksanakan kebijakan Kementerian Keuangan dalam modernisasi pengelolaan rekening, melalui:
 - a. restrukturisasi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. restrukturisasi rekening pemerintah dalam rangka simplifikasi dan akuntabilitas pengelolaan rekening;
- b. penggunaan transaksi elektronik dan digital untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai melalui *Cash Management System* (CMS), kartu debit, kartu kredit, dan Digipay; dan
- c. optimalisasi penggunaan Aplikasi SPRINT untuk pengelolaan rekening, dimulai sejak pendaftaran, pembukaan, *monitoring*, pelaporan, hingga penutupan rekening.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan,



www.kemenkeu.go.id
Hadiyanto





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : S-40/MK.5/2022

Tanggal : 18 Juni 2022

DAFTAR PIMPINAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
5. Ketua Mahkamah Agung RI
6. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
7. Ketua Komisi Yudisial RI
8. Jaksa Agung RI
9. Menteri Sekretariat Negara
10. Menteri Dalam Negeri
11. Menteri Luar Negeri
12. Menteri Pertahanan
13. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Menteri Keuangan
15. Menteri Pertanian
16. Menteri Perindustrian
17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Menteri Perhubungan
19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
20. Menteri Kesehatan
21. Menteri Agama
22. Menteri Ketenagakerjaan
23. Menteri Sosial
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Menteri Kelautan dan Perikanan
26. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
28. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
29. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata
32. Menteri Badan Usaha Milik Negara
33. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
34. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
35. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

36. Kepala ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

36. Kepala Badan Intelijen Negara
37. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
38. Ketua Dewan Ketahanan Nasional
39. Kepala Badan Pusat Statistik
40. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Pembangunan
41. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
42. Kepala Perpustakaan Nasional
43. Menteri Komunikasi dan Informatika
44. Kepala Kepolisian Negara RI
45. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
46. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
47. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
48. Kepala Badan Narkotika Nasional
49. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
50. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
51. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
52. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
53. Ketua Komisi Pemilihan Umum
54. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55. Kepala Badan Informasi Geospasial
56. Kepala Badan Standardisasi Nasional
57. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58. Kepala Lembaga Administrasi Negara
59. Kepala Arsip Nasional RI
60. Kepala Badan Kepegawaian Negara
61. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
62. Menteri Perdagangan
63. Menteri Pemuda dan Olahraga
64. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
65. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
66. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
67. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
68. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
69. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
70. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
71. Ketua Ombudsman RI
72. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75. Sekretaris Kabinet
76. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

77. Direktur ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

77. Direktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 78. Direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
 79. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 80. Kepala Badan Keamanan Laut
 81. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 82. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 83. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
-

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Hadiyanto

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, Laman www.kemenkeu.go.id





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2 DAN 3, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710;
TELEPON: 021-3449230 PSW. 5403, (021) 3844423; FAKSIMILE (021) 3844423; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : UND-201/PB.3/2022 15 Juli 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Rapat Rekonsiliasi Rekening Pemerintah

Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana daftar terlampir

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini kami harapkan bantuan Saudara dapat menugaskan pejabat dan/atau pegawai untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Sesuai jadwal terlampir

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Subdirektorat MRLPPB
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat
(dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas, maka rekonsiliasi dapat dilakukan secara jarak jauh)

Acara : Rekonsiliasi Data Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup
Kementerian Negara/Lembaga Periode Triwulan II Tahun 2022

Dalam rangka tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan pada LHP TA 2021, dilakukan rekonsiliasi rekening dengan Satker BA BUN (BA 999) yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja mulai Triwulan II Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara dapat menyediakan dukungan pembiayaan untuk para peserta rekonsiliasi dimaksud dari unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



<https://www.djpb.kemkeu.go.id>

Noor Faisal Achmad



Jadwal Rekonsiliasi
 Data Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
 Periode Triwulan II Tahun 2022

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Petugas Rekon	Waktu Rekonsiliasi
1	010	Kementerian Dalam Negeri	Adit	Selasa, 19 Juli 2022
2	025	Kementerian Agama	Agus	
3	051	Badan Siber dan Sandi Negara	Nanda	
4	066	Badan Narkotika Nasional	Nanda	
5	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Nurkholis	
6	114	Sekretaris Kabinet RI	Qoyyim	
7	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Rizki	
8	076	Komisi Pemilihan Umum	Ferik	
9	018	Kementerian Pertanian	Roni	
10	044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Rudi	
11	052	Dewan Ketahanan Nasional	Rudi	
12	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Adit	
13	077	Mahkamah Konstitusi RI	Agus	
14	015	Kementerian Keuangan	Nanda	
15	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Nurkholis	
16	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Qoyyim	
17	110	Ombudsman Republik Indonesia	Qoyyim	
18	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	Rizki	
19	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Ferik	
20	022	Kementerian Perhubungan	Roni	
21	004	Badan Pemeriksa Keuangan	Roni	
22	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rudi	
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Adit	Kamis, 21 Juli 2022
24	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Adit	
25	042	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	Agus	
26	005	Mahkamah Agung	Nanda	
27	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nurkholis	
28	041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	Qoyyim	
29	120	Kementerian Koordinator Kemaritiman	Rizki	
30	067	Kementerian Negara, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Ferik	
31	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Roni	
32	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Roni	
33	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Rudi	

